# DINAS TENAGA KERJA
# KABUPATEN NGANJUK

# LAPORAN EVALUASI RENJA
# TRIWULAN I
# TAHUN ANGGARAN 2026

JL. Dermojoyo Nomor 45 Nganjuk
Telp / Fax : 0358 -325200
Web : disnaker.nganjukkab.go.id
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

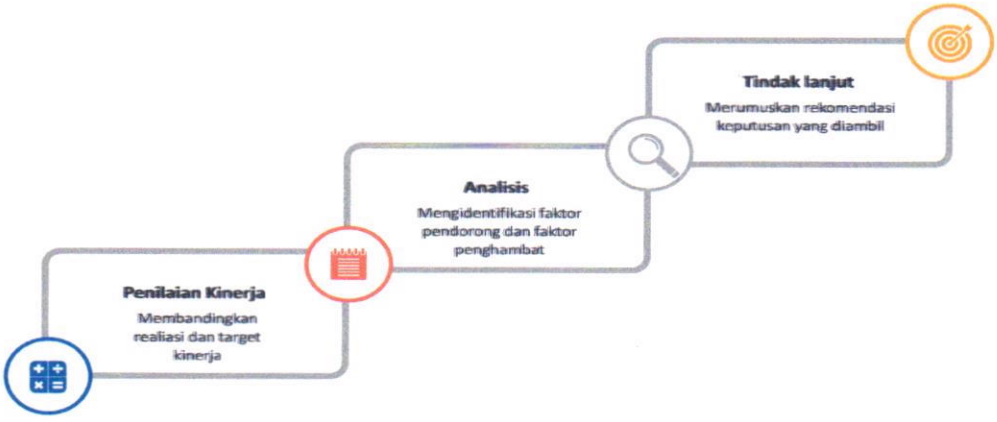
## I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sampai triwulan I melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2026 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja**




Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

## I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029..
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

## I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

## I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2026, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

## I.5. Metode Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

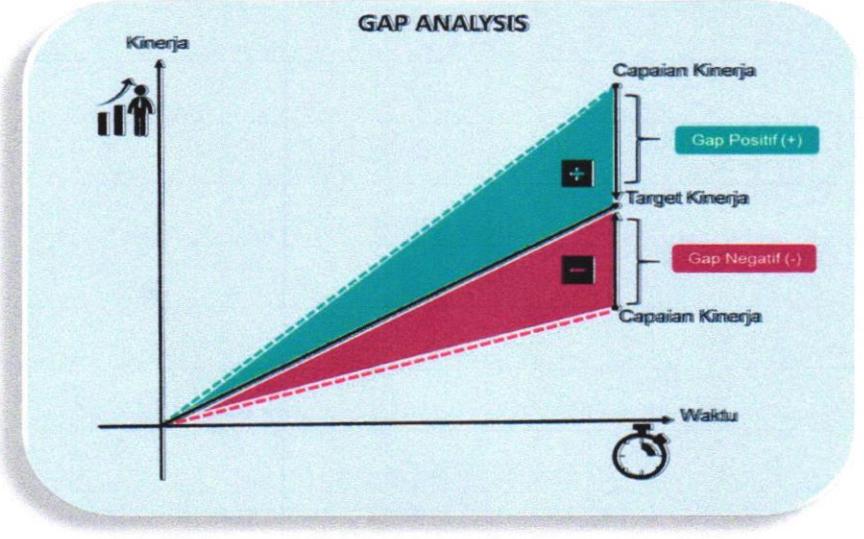
| No. | Interval Nilai Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian Capaian Kinerja |
|---|---|---|
| 1. | ≥ 91% | Sangat Tinggi |
| 2. | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3. | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

**Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja**



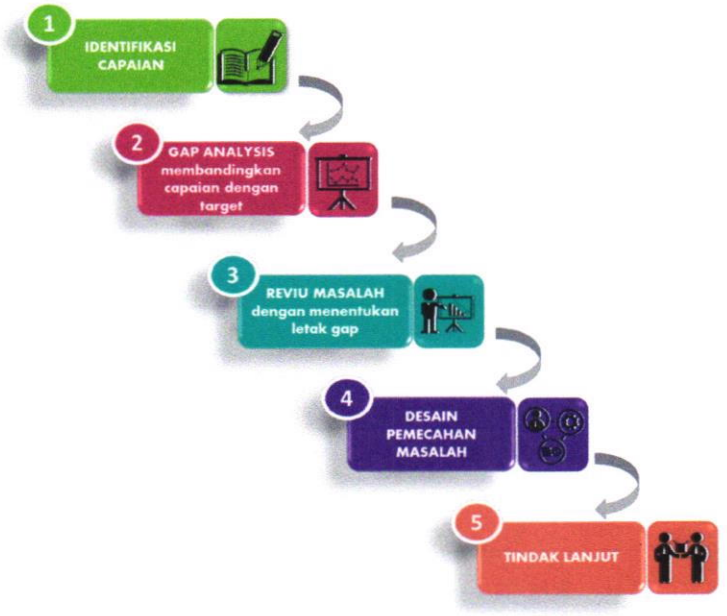

*Gap* antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date.* Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

# BAB II

# CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

## II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator | Kinerja Tahun 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | **Tujuan :** Meningkatnya Kesempatan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupia/Tenaga Kerja) | 35,86 | 46,59 | 129,92% |
| 2 | **Sasaran 1 :** Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | Persentase Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) | 70,11% | 73,19 | 104,28% |
| | **Sasaran 2 :** Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan (%) | 100% | 100 | 100% |

- Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026

  Dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja triwulan I Tahun 2026 [ realisasi Meningkatnya Kesempatan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja 46,59 dari target 35,86 realisasi kinerja 129, 92 dan sasaran pertama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 73,19% dari target yang telah ditentukan sebesar 70,11% realiasai kinerja 104,28% data sementara dari BPS Tahun 2025

  Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan target kinerja 100% karena tidak ada perselisihan yang harus diselesaikan.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| **2** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA** | **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | **76,20** | | | |
| **2** | **07** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun** | **26 laporan** | 12 laporan | | 15,38% |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 laporan | 10 laporan | | 50% |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 laporan | 2 laporan | | % |
| **2** | **07** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja** | **Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun** | **4 dokumen** | | 2 dokumen | 50% |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 18 orang/bulan (350 orang) | 72 orang | 72 orang | 56% |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan | 1 laporan | 0 | -0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| | | | | | | keuangan bulanan/triwulan/smesteran | | | | |
| **2** | **07** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja** | **Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah** | **28 dokumen** | | | 25% |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan | 4 laporan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 25% |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 25% |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 dokumen | 1 laporan | 1 laporan | 25% |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 25% |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 25% |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan** | **198 unit** | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang | 10 unit | 0 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| | | | | | | disediakan | | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 3 unit | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia** | **12 laporan** | | | 25% |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 25% |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 25% |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan | 4 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 25% |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| | | | | | Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | |
| **2** | **07** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara** | **28 unit** | - | | |
| **2** | **07** | **01** | **2.09** | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100% |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | 10 unit | 4 unit | 4 unit | |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| | | | | | Lapangan | Perizinannya | | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | 2 unit | 0 | 0 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 unit | 2 unit | 2 unit | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 5 unit | 0 | 0 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 unit | 0 | | |
| **2** | **07** | | | | **Urusan Bidang Tenaga Kerja** | | | | | |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| **2** | **07** | **03** | | | **Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **Prosentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan** | **15%** | | | |
| **2** | **07** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi** | **Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih** | **440 orang** | | | |
| **2** | **07** | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | 765 orang | 30 orang | | 28,57% |
| **2** | **07** | 03 | 2.01 | 0004 | Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | 25 orang | 0 | | |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| **2** | **07** | 03 | 2.02 | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | **Persentase LPK Swasta yang dibina** | **3 lembaga** | | | |
| 2 | 07 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina | 25 lembaga | 25 lembaga | | 100% |
| **2** | **07** | **03** | **2.04** | | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil** | **Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas** | **11%** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **07** | 03 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas | 15 Perusahaan | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **04** | | | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | **Persentase Tingkat Kesempatan Kerja** | **96,41%** | 76,66% | 76,66% | |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| **2** | **07** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pemagangan kerja** | **87%** | | | |
| **2** | **07** | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi | 50 orang | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | 04 | 2.01 | 0002 | Pelayanan Antar kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL | 140 orang | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | 04 | 2.01 | 0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi | 20 orang | 0 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Target | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| | | | | | | layanan ULD | | | | |
| **2** | **07** | **04** | **2.03** | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **Persentase cakupan penyebarluasan informasi pasar kerja** | **85%** | | | |
| **2** | **07** | 04 | 2.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja | 1.000 orang | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **04** | **2.04** | | **Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi** | **85%** | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 07 | 04 | 2.04 | 0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah PMI purna yang diperdayakan | 20 orang | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **05** | | | **Program Hubungan Industrial** | **Persentase Angka Sengketa Perusahaan Pertahun** | **2,3%** | 0 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| **2** | **07** | **05** | **2.01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Perusahaan yang memliki LKS Bipartitaktif** | **20 perusahaan** | 0 | 0 | 25% |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI) | 1 laporan | 0 | 0 | 25% |
| **2** | **07** | **05** | **2.02** | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan** | **Presentase Perselisihan yang tertangani di PB** | **90%** | 0 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| | | | | | **Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perselisihan yang dicegah | 5 perkara | 0 | 0 | 20% |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisiajn Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 | Jumlah Perkara perselisihan yang dicegah | 4 perkara | 0 | 0 | 25% |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| | | | | | (satu) daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang dibina | 1 lembaga | -- | - | - |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja | 15.700 orang | - | - | - |
| **3** | | | | | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | |
| **3** | **32** | | | | **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi** | | | | | |
| **3** | **32** | **03** | | | **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | **Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang** | **40%** | 0 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | | Realisasi Tribulan I Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Realisai s/d TW I | Capaian |
| | | | | | | **diberangkatkan** | | | | |
| **3** | **32** | **03** | **2.01** | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase calon transmigran yang diberangkatkan** | **80%** | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 32 | 03 | **2.01** | 0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yangbersal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah calion Tranmigran yang didipindahkan/ditempatkan | **1 KK** | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 32 | 03 | **2.01** | 0009 | Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran | Jumlah calon lokasi tranmigran yang dilaksanakan penjajakan | 1 lokasi | 0 | 0 | 0 |

- Analisis capaian kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator inedeks Kepuasan masyarakat (IKM) telah terealisasi sebagai berikut :

| No. | OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK | NILAI IKM | KATEGORI | JUMLAH RESPONDEN | METODE SKM | UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN | RENCANA TINDAK LANJUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | DINAS TENAGA KERJA | 89,75 | A (Sangat Baik) | 485 | Sukma e-Jatim (SKM Online) | 1. Sarana dan Prasarana | Unsur Sarana dan Prasarana:<br>• Penambahan perangkat keras personal computer untuk akses Aplikasi sehingga meminimalisir antrian pemohon |
| | | | | | | 2. Waktu Penyelesaian | Unsur Waktu Penyelesaian:<br>• Memberikan pemahaman kepada Calon PMI maupun PPTKIS terkait kelengkapan berkas yang baik dan benar guna meminimalisir proses upload ulang. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3. Produk Spesifikasi Jenis Layanan | Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan:<br>• Tim teknis akan terus memantau kinerja layanan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan melakukan pembaruan atau perbaikan sesuai kebutuhan. |

Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase tingkat keberhasilan Trasmigran yang diberangkatkan belum terealisasi hal ini dikarenakan kuota penempatan transmigrasi dari kementrian Desa Pembangunan Darah tertinggal dan Transmigrasi hanya 1 KK.

- Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026

Realisasi di tahun 2026 pada triwulan I pada indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pelatihan barbershop yang terdiri dari 2 (dua) angkatan dengan jumlah peserta 15 orang disetiap angkatannya. Jadi untuk target di triwulan I sudah tercapai.

Untuk indikator Jumlah perselisihan yang dicegah telah dilakukan kegiatan bimtek penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diikuti oleh 40 perusahaan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk menekan angka perselisihan yang terjadi di antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berarti jika jumlah perkara perselisihan yang diselesaikan maupun jumlah perselisihan yang dicegah terealisasi semakin kecil dari target maka dikatakan tercapai atau baik.

➢ Analisis realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| **2** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA** | **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | **76,00** | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun** | **49.900.000** | 3.800.000 | 7,61 |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | 32.400.000 | 3.800.000 | 11,72 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 17.500.000 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja** | **Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun** | **3.006.703.658** | **492.719.097** | **16,38** |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 3.002.563.658 | 492.719.097 | 16,40 |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/sem | 4.140.000 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | esteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran | | | |
| **2** | **07** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja** | **Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan** | **320.481.700** | **35.026.345** | **10.92** |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan | 1.894.000 | 0 | 0 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang | 51.040.100 | 7.037.950 | 13,78 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | | Disediakan | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6.845.600 | 4.306.700 | 62,91 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 42.500.000 | 0 | 0 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.240.000 | 0 | 0 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 209.962.000 | 23.681.695 | 11,27 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan** | **79.547.565** | **0** | **0** |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 75.547.565 | 0 | 0 |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 4.187.900 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia** | **704.021.100** | **99.829.716** | **14,17** |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan jasa surat | Jumlah Laporan | 2.200.000 | 180.000 | 8,18 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 108.245.100 | 21.562.268 | 19,91 |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 593.576.000 | 78.087.448 | 13,15 |
| **2** | **07** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara** | **382.019.400** | **32.988.500** | **8,63** |
| **2** | **07** | **01** | **2.09** | 0001 | Penyediaan Jasa | Jumlah kendaraan | 45.296.250 | 7.250.000 | 16 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan | perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 123.113.150 | 20.308.500 | 16,49 |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10.350.000 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 193.260.000 | 5.430.000 | 2,80 |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7.000.000 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **03** | | | **Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard** | **1.363.756.550** | **126.842.000** | **9,30** |
| **2** | **07** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan** | **Persentase peserta** | **1.306.002.550** | **126.842.000** | **9,71** |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | **Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi** | **pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi** | | | |
| **2** | **07** | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | 1.287.202.550 | 126.842.000 | 9,85 |
| **2** | **07** | 03 | 2.01 | 0004 | Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelaihan berbasis kompetensi pada tahun n | 18.800.000 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | 03 | 2.02 | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja** | **Persentase LPK Swasta yang dibina** | **45.950.000** | **0** | **0** |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | **Swasta** | | | | |
| 2 | 07 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina | 45.950.000 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **03** | **2.04** | | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil** | **Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas** | **11.804.000** | **0** | **0** |
| **2** | **07** | 03 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas | 11.804.000 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **04** | | | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | **Persentase tingkat partisipasi angkatan** | **812.195.800** | **0** | **0** |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | | **kerja (TPAK)** | | | |
| **2** | **07** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan** | **621.859.800** | **0** | **0** |
| **2** | **07** | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi | 64.006.000 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | 04 | 2.01 | 0002 | Pelayanan Antar Kerja | Jumlah tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL | 497.835.400 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | 04 | 2.01 | 0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas | Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang | 60.018.400 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | Ketenagakerjaan | mendapatkan fasilitasi layanan ULD | | | |
| **2** | **07** | **04** | **2.03** | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online** | **141.800.000** | **0** | **0** |
| **2** | **07** | 04 | 2.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja | 141.800.000 | 0 | 0 |
| **2** | **07** | **04** | **2.04** | | **Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terfasilitasi** | **48.536.000** | **0** | **0** |
| **2** | **07** | 04 | 2.04 | 0003 | Pemberdayaan Pekerja | Jumlah PMI Purna | 48.536.000 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | Migran Indonesia Purna Penempatan | yang diperdayakan | | | |
| **2** | **07** | **05** | | | **Program Hubungan Industrial** | **Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan** | **2.438.902.000** | **26.850.000** | **1,10** |
| **2** | **07** | **05** | **2.01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%** | **19.100.000** | 600.000 | 3,14 |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0003 | Penyelenggaraan | Jumlah data dan informasi sarana | 19,100.000 | 600.000 | 3,14 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI) | | | |
| **2** | **07** | **05** | **2.02** | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun** | **2.419.802.000** | **26.250.000** | **1,08** |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan | Jumlah perselisihan yang dicegah | 387.465.000 | 26.250.000 | 6,8 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang dicegah | 15.250.000 | 0 | 0 |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan | Jumlah LKS Tripartit | 61.700.000 | 0 | 0 |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| | | | | | Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | yang dibina | | | |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja | 1.955.377.000 | 0 | 0 |
| **3** | | | | | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | **18.000.000** | **0** | **0** |
| **3** | **32** | | | | **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi** | | **18.000.000** | **0** | **0** |
| **3** | **32** | **03** | | | **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | **Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan** | **18.000.000** | **0** | **0** |

| Kode Rekening | | | | | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
| **3** | **32** | **03** | **2.01** | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase calon transmigran yang diberangkatkan** | **18.000.000** | **0** | **0** |
| 3 | 32 | 03 | **2.01** | 0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan | 18.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | **JUMLAH** | **9.177.715.673** | **818.055.658** | **8,91** |

# BAB III
# FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

## III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

| No. | Tujuan/Sasaran Dinas Tenaga Kerja | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kesempatan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja | Fasilitasi pelatihan dan peningkatan aktivitas produksi, yang secara langsung membutuhkan lebih banyak tenaga kerja | **ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja, rendahnya kualitas SDM (pendidikan/keterampilan), serta penggunaan teknologi** |
| 2 | Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi | Sumber data TPT dan TPAK ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali pada bulan Desember atau pada triwulan IV |
| 3 | Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis | Memberikan arahan kepada Perusahaan agar sistem kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. | Pemantauan sistem kerja maupun jalannya produksi Perusahaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku atau belum. |

## III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

| Kode Rekening | | | | | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | |
| **2** | **07** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| **2** | **07** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja** | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| **2** | **07** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Dinas Tenaga** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Kerja** | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| **2** | **07** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| **2** | **07** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| **2** | **07** | | | | **Urusan Bidang Tenaga Kerja** | | |
| 2 | 07 | 03 | | | Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang | Masih cukup banyaknya masyarakat yang belum |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| **2** | **07** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
| **2** | **07** | | | | **Urusan Bidang Tenaga Kerja** | | |
| 2 | 07 | 03 | | | Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang | Masih cukup banyaknya masyarakat yang belum |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) |
| **2** | **07** | **03** | **2.02** | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi | Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi |
| 2 | 07 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi | Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi |
| **2** | **07** | **03** | **2.04** | | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil** | Hasil pengukuran produktivitas pada Perusahaan kecil dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan usaha | Perusahaan kecil masih belum menyadari pentingnya pengukuran tingkat produktivitas |
| **2** | **07** | 03 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas | Masih banyaknya | Pelaksanaan Kegiatan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | kepada Perusahaan Kecil | perusahaan kecil yang belum memahami cara mengukur produktivitas | Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil direncanakan akan dilaksanakan pada TW II |
| **2** | **07** | **04** | | | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri manufaktur seiring dengan bergesernya / relokasi industri padat karya ke Kabupaten Nganjuk | Tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja |
| **2** | **07** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | Masih banyaknya pencari kerja terdaftar yang belum ditempatkan | Kurangnya kompetensi petugas antar kerja dalam memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal |
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | Masih rendahnya kompetensi petugas antar kerja dalam | Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | penyuluhan / bimbingan jabatan bagi pencari kerja | direncanakan akan dilaksanakan pada TW II |
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelayanan Antar Kerja | Tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja | Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja direncanakan akan dilaksanakan pada TW II |
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Perusahaan masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban mereka untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas | Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan direncanakan akan dilaksanakan pada TW III |
| **2** | **07** | **04** | **2.03** | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | Tersedianya platform digital informasi pasar kerja seperti Karirhub, MERGAWE maupun melalui kanal media sosial OPD | Tidak maksimalnya pemanfaatan platform baik pencari kerja maupun pemberi kerja |
| 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja | Tersedianya lowongan | Pelaksanaan Kegiatan Job |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | pekerjaan dalam jumlah yang besar dalam satu kegiatan | Fair/Bursa Kerja direncanakan akan dilaksanakan pada TW II |
| **2** | **07** | **04** | **2.04** | | **Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | Masih tingginya minat Masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk bekerja sebagai PMI | Masih banyaknya PMI yang kurang mempunyai keterampilan untuk bersaing di pasar kerja |
| 2 | 07 | 04 | 2.04 | 0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | PMI purna penempatan belum sepenuhnya diintervensi oleh Dinas sehingga lebih produktif dan berdaya saing | Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan direncanakan akan dilaksanakan pada TW III |
| **2** | **07** | **05** | | | **Program Hubungan Industrial** | | |
| **2** | **07** | **05** | **2.01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta | Pendataan diperlukan untuk menjaga hubungan antara | Masih terdapat perusahaan yang belum menyampaikan data ketenagakerjaan secara |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pengupahan | pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah agar tetap kondusif dinamis dan berkeadilan | rutin dan lengkap |
| **2** | **07** | **05** | **2.02** | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit yang di fasilitasi oleh dinas | Kurangnya pemahaman dari sisi pekerja dan pengusaha terkait norma dan syarat kerja |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Mengopatimalkan peranan mediator hubungan industrial dalam menyelesaikan perselisihan | Masih terdapat pekerja dan pengusaha yang belum memahami mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan, sehingga |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | memperlambat proses penyelesaian. |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan peran aktif LKS Tripartit Kabupaten Nganjuk untuk membantu Bpati dalam merumuskan kebijakan di sektor ketenagakerjaan | Keterbatasan LKS Tripartit dalam melakukan kunjungan ke perusahaan yang rawan perselisihan hubungan industrial |
| ***2*** | ***07*** | 05 | 2.02 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja | Kesadaran akan pentingnya perlindungan norma kerja dalam hal ini Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan usaha | Belum terlaksana dikarenakan masih menyusun daftar nama penerima bantuan iuran |
| **3** | | | | | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | |
| **3** | **32** | | | | **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **32** | **03** | | | **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | Pemerataan jumlah penduduk dalam suatu wilayah | Belum adanya kuota calon transmigran yang diberangkatkan dari Kementerian Transmigrasi |
| **3** | **32** | **03** | **2.01** | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Terwujudnya persebaran penduduk | Belum adanya kuota calon transmigran yang diberangkatkan dari Kementerian Transmigrasi |
| 3 | 32 | 03 | 2.01 | 0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Memberikan pendampingan calon transmigrasi sampai ke Lokasi penempatan transmigran | Belum adanya kuota calon transmigran yang diberangkatkan dari Kementerian Transmigrasi |
| 3 | 32 | 03 | 2.01 | 0009 | Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran | Memastikan kesiapan / kelayakan hunian dan lahan untuk penempatan transmigran | Belum adanya kuota calon transmigran yang diberangkatkan dari Kementerian Transmigrasi |
| 3 | 32 | 03 | 2.01 | 0009 | Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigran | Memastikan keberhasilan transmigran pasca penempatan | Kegiatan tidak dilaksanakan karena termasuk dalam refocusing anggaran |

# BAB IV
# PENUTUP

## IV.1. Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Rentra PD Tahun 2025-2029 Kabupaten Nganjuk.

Dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 beserta *output* dan *outcome*nya, sehingga target kinerja tahun 2026 dapat dicapai dengan optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
   c. menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan

3. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 9 April 2026
a.n Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Sekretaris




**SINGGIH WIRATNO, S.AP**
Penata Tk. I
NIP. 19680819 199202 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
**DINAS TENAGA KERJA**
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. ( 0358 ) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   **Kegiatan** : **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan : Register pencatatan pengesahan peraturan perusahaan

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s.d Maret

Hambatan : Masih banyak perusahaan yang wajib memiliki PP akan tetapi tidak melakukan pencatatan peraturan perusahaan ke Dinas

Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait norma dan syarat kerja di Perusahaan

**REGISTER PP 2026**

| NO. | BULAN | NAMA PERUSAHAAN | NOMOR PENCATATAN | MASA BERLAKU | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AWAL | AKHIR |
| 1 | Januari | PT Eagle Sporting Goods | 500.15.12.1/001/HIPTK-PP/411.311/2026 | 14 Januari 2026 | 14 Januari 2028 |
| 2 | Januari | PT Indopack Printing | 500.15.12.1/002/HIPTK-PP/411.311/2026 | 21 Januari 2026 | 21 Januari 2028 |
| 3 | Februari | | | | |
| 4 | Maret | | | | |

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
**DINAS TENAGA KERJA**
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. ( 0358 ) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   **Kegiatan** : **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan : Pendataan Sarana Hubungan Industrial

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s.d Maret

Hambatan : Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data terbaru ketenagakerjaan ke Dinas

Tindak Lanjut : Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan

**DATA AKUMULATIF PROFIL HUBUNGAN INDUSTRIAL**
**TAHUN 2026**

| NO | JUMLAH | | 2025 | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perusahaan Tercatat | | 232 | 232 | 232 | 232 | | | | | | | | | |
| 2 | Tenaga Kerja Terdaftar | | 28.452 | 25.151 | 25.151 | 25.151 | | | | | | | | | |
| 3 | Peraturan Perusahaan | | 15 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | Perjanjian Kerja Bersama | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | PKWT Tercatat | | 11.268 | 1.452 | 2.385 | 3.117 | | | | | | | | | |
| 6 | LKS Bipartit | | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | SP/SB Tingkat Perusahaan | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | Perselisihan Hubungan Industrial yang Tercatat | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| 9 | Perselisihan HI yang Selesai Diluar Pengadilan | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 10 | Mogok Kerja | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 11 | Tenaga Kerja Peserta BPJamsostek | | 23.008 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Tenaga Kerja Peserta BPJS Kesehatan | | 20.118 | 139.110 | 138.536 | 134.672 | | | | | | | | | |
| 13 | PHK | Pencairan JHT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | Laporan dari Perusahaan | 1.358 | 9 | 6 | 13 | | | | | | | | | |

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
**DINAS TENAGA KERJA**
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. ( 0358 ) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   **Kegiatan** : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

| | | |
|---|---|---|
| Pelaksanaan Kegiatan | : | Pembinaan Norma dan Syarat Kerja |
| Waktu Pelaksanaan | : | Rabu, 11 Februari 2026 |
| Hambatan | : | Sosialisasi ditujukan untuk Pengusaha agar mengetahui norma kerja pada Perusahaan agar dapat meminimalisir terjadinya permasalaha dengan pekerja |
| Tindak Lanjut | : | Perlu penerapan sanksi administratif terhadap Perusahaan yang tidak comply terhadap aturan ketenagakerjaan |





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
**DINAS TENAGA KERJA**
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. ( 0358 ) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   **Kegiatan** : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

| | | |
|---|---|---|
| Pelaksanaan Kegiatan | : | Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan HI |
| Waktu Pelaksanaan | : | Selasa, 31 Maret 2026 |
| Hambatan | : | Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditujukan untuk menambah pengetahuan Perusahaan maupun pekerja/buruh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada |
| Tindak Lanjut | : | Perlu pemahaman antara Perusahaan dan Pekerja/Buruh terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku |





FORMULIR E 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA KABUPATEN NGANJUK

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2026

| No | Sesaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026) | | | Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14=13/8 | | 15=7+13 | | | 16=15/8 | | 17 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai) | 77 | nilai | 8.928.434.000 | 75,20 | nilai | 4.523.555.988 | 76,10 | nilai | 4.542.661.323 | | 884.363.656 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 884.363.656 | 0,00 | 0,15 | 75,30 | nilai | 5.187.919.646 | 0,98 | 0,75 | DINAS TENAGA KERJA |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **41.400.000** | | | **15.732.000** | | | **49.900.000** | | **3.800.000** | | - | | - | | - | | dokumen | **3.800.000** | | **0,08** | | | | | **0** | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18 | dokumen | **32.400.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | **0,00** | 0 | - | - | 0,00 | 0 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 | dokumen | 15.000.000 | 18 | dokumen | 8.224.000 | 18 | dokumen | 32.400.000 | 6 | dokumen | 3.800.000 | | | | | | | 6,00 | dokumen | 3.800.000 | 0 | 0,12 | 24 | | 12.024.000 | 1,33 | 0,80 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 | dokumen | 15.000.000 | 6 | dokumen | 7.508.000 | 6 | dokumen | 17.500.000 | | - | | | | | | | - | | - | - | 0,00 | 6 | | 7.508.000 | 1,00 | 0,50 | |
| | | | Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 | dokumen | 5.000.000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | Berita acara | 6.400.000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **3.661.985.000** | | | **2.840.001.000** | | | **3.006.703.858** | | **492.719.097** | | - | | - | | - | | | 492.719.097 | | **0,16** | | | 3.332.720.097 | | **0,91** | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 | orang | 3.657.833.000 | 21 | orang | 2.840.001.000 | 18 | orang | 3.002.563.858 | 17 | orang | 492.719.097 | | | | | | | 17,00 | | 492.719.097 | 0,94 | 0,16 | 38 | | 3.332.720.097 | 1,52 | 0,91 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1 | laporan | 4.152.000 | - | - | - | 1 | laporan | 4.140.000 | | - | | | | | | | | | - | | - | 1 | laporan | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | 97.500.000 | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 1 | paket | 17.500.000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang Undangan | 1 | paket | 80.000.000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **460.125.000** | | | **305.277.788** | | | **320.481.780** | | **35.026.345** | | - | | - | | - | | | **35.026.345** | | **0,11** | | | **326.304.133** | | **0,71** | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | paket | 7.500.000 | 4 | paket | 5.108.650 | 1 | paket | 1.894.000 | | - | | | | | | | | | - | | - | 1 | paket | 4 | | 5.108.650 | 4,00 | 0,68 | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 | paket | 86.500.000 | 4 | paket | 63.750.978 | 4 | paket | 51.040.100 | | 7.037.950 | | | | | | | | | 7.037.950 | - | 0,14 | 4 | | 70.788.928 | 1,00 | 0,82 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 | paket | 15.000.000 | 4 | laporan | 9.219.160 | 4 | paket | 6.846.600 | | 4.306.700 | | | | | | | | | 4.306.700 | - | 0,63 | 4 | | 13.525.860 | 1,00 | 0,90 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan | 4 | dokumen | 6.000.000 | 12 | dokume n | 3.000.000 | 4 | dokumen | 42.500.000 | | - | | | | | | | | | - | - | 0,00 | 12 | | 3.000.000 | 3,00 | 0,50 | |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 | laporan | 20.125.000 | 4 | laporan | 14.000.000 | 4 | laporan | 8.240.000 | | - | | | | | | | | | - | - | 0,00 | 4 | | 14.000.000 | 1,00 | 0,70 | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026) | | | Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14=13/8 | | 15=7+13 | | | 16=15/8 | | 17 | | |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | | | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | laporan | 395.000.000 | 4 | laporan | 196.199.000 | 4 | laporan | 209.962.000 | | 23.681.695 | | | | | | | | | 23.681.695 | - | | 0,11 | 4 | | 219.880.695 | 1,00 | 0,75 | | |
| | | | Penatausahaan Arsip Dinamis | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 1 | dokumen | 30.000.000 | 4 | dokumen | 14.000.000 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **335.000.000** | | | **496.506.800** | | | **79.735.465** | | - | | - | | - | | - | | | - | | 0,00 | | | **496.506.800** | | 1,48 | | |
| | | | Pengadaan Mebel | | 10 | unit | 70.000.000 | 20 | unit | 38.382.300 | 0 | 0 | 0 | | - | | - | | - | | - | | | - | 0 | 0,00 | 20,00 | | 38.382.300 | 2,00 | 0,55 | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 | unit | 260.000.000 | 10 | unit | 444.878.860 | 10 | unit | 75.547.565 | | - | | - | | - | | - | | | - | - | 0,00 | 10 | | 444.878.860 | 1,00 | 1,71 | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 | unit | 5.000.000 | 5 | unit | 13.305.650 | 3 | unit | 4.187.900 | | - | | - | | - | | - | | | - | - | 0,00 | 5 | | 13.305.650 | 0,33 | 2,66 | | |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | **653.500.000** | | | **488.854.000** | | | **704.021.100** | | **99.829.716** | | - | | - | | - | | | **99.829.716** | | 0,14 | | | **586.683.716** | | 0,86 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 | laporan | 10.000.000 | 12 | laporan | 2.390.000 | 4 | laporan | 2.200.000 | | 180.000,00 | | | | | | | | | 180.000 | - | 0,08 | 12 | | 2.570.000 | 3,00 | 0,26 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 | laporan | 98.000.000 | 4 | laporan | 65.000.000 | 4 | laporan | 108.245.100 | | 21.582.268 | | | | | | | | | 21.582.268 | - | 0,20 | 4 | | 86.582.268 | 1,00 | 0,80 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | laporan | 575.000.000 | 4 | laporan | 421.464.000 | 4 | laporan | 593.576.000 | | 78.067.448 | | | | | | | | | 78.067.448 | - | 0,13 | 4 | | 499.561.448 | 1,00 | 0,87 | | |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terpelihara** | | | **1.649.424.000** | | | **377.134.400** | | | **382.019.400** | | **32.998.500** | | - | | - | | - | | | 32.998.500 | | 0,09 | | | 410.112.900 | | 0,25 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | unit | 76.000.000 | 1 | unit | 48.650.000 | 1 | unit | 45.296.250 | | 7.250.000 | | | | | | | | | 7.250.000 | - | 0,16 | 1 | | 55.900.000 | 1,00 | 0,74 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 | unit | 225.924.000 | 10 | unit | 98.624.400 | 10 | unit | 123.113.150 | | 20.308.500 | | | | | | | | | 20.308.500 | - | 0,16 | 10 | | 118.932.900 | 1,00 | 0,53 | | |
| | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 | unit | 25.000.000 | 3 | unit | 3.000.000 | 2 | unit | 3.000.000 | | - | | | | | | | | | - | - | 0,00 | 3 | | 3.000.000 | 1,50 | 0,12 | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 | unit | 40.000.000 | 6 | unit | 10.150.000 | 10 | unit | 10.350.000 | | - | | | | | | | | | - | - | 0,00 | 6 | | 10.150.000 | 1,20 | 0,25 | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | unit | 1.227.500.000 | 3 | unit | 209.700.000 | 5 | unit | 193.260.000 | | 5.430.000 | | | | | | | | | 5.430.000 | - | 0,03 | 3 | | 215.130.000 | 0,60 | 0,18 | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | unit | 86.000.000 | 2 | unit | 7.000.000 | 5 | unit | 7.000.000 | | - | | | | | | | | | - | - | 0,00 | 2 | | 7.000.000 | 0,20 | 0,13 | | |
| | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi** | 52,82 | % | **471.797.000** | - | | **2.152.216.950** | 52,82 | % | **1.363.756.550** | | **126.842.000** | | | | | | | | | - | | 126.842.000 | - | 0,09 | 0 | | 2.279.058.950 | 0,00 | 4,53 | DINAS TENAGA KERJA | |
| | | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | | | **362.000.000** | | | **2.047.219.950** | | | **1.308.002.550** | | **126.842.000** | | | | | | | | | - | | 126.842.000 | | 0,10 | | | 2.174.061.950 | | 6,01 | | |
| | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 140 | orang | 360.000.000 | 570 | orang | 2.047.219.950 | 785 | orang | 1.287.202.550 | 30 | orang | 126.842.000 | | | | | | | | | 30,00 | orang | 126.842.000 | 0,04 | 0,10 | 800 | | 2.174.061.950 | 4,29 | 6,21 | | |
| | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 25 | orang | 12.000.000 | 0 | | - | 25 | orang | 18.800.000 | | - | | | | | | | | | - | - | 0,00 | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | | | | **79.850.000** | | | **75.050.000** | | | **45.950.000** | | - | | | | | | | | | - | | 0,00 | | | 75.050.000 | | 0,94 | | |
| | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 45 | lembaga | 79.850.000 | 45 | lembaga | 75.050.000 | 25 | lembaga | 45.950.000 | 25 | lembaga | - | | | | | | | | | 25,00 | lembaga | - | 1 | 0,00 | 70 | | 75.050.000 | 1,56 | 0,94 | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievalusi (2026) | | | Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14=13/8 | | 15=7+13 | | | 16=15/8 | | 17 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | | | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil** | | | | **29.947.000** | | | **29.947.000** | | | **11.804.000** | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | | | 29.947.000 | | 1,00 | |
| | | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 16 | perusahaan | 29.947.000 | 35 | perusahaan | 29.947.000 | 15 | perusahaan | 11.804.000 | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | 35 | | 29.947.000 | 2,33 | 1,00 | |
| | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten** | 77 | % | **905.867.150** | | | **858.385.800** | 77 | % | **812.195.800** | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | 0 | | 858.385.800 | 0,00 | 0,73 | DINAS TENAGA KERJA |
| | | | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **615.337.500** | | | **397.852.800** | | | **621.359.800** | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | | | 397.852.800 | | 0,65 | |
| | | | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | 50 | orang | 49.975.000 | 50 | orang | 45.975.000 | 50 | orang | 64.008.000 | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | 50 | | 45.975.000 | 1,00 | 0,92 | |
| | | | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL | 120 | orang | 500.401.000 | 60 | orang | 286.916.000 | 140 | orang | 497.835.400 | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | 60 | | 286.916.000 | 0,50 | 0,57 | |
| | | | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | 20 | orang | 64.961.800 | 40 | orang | 64.961.800 | 20 | orang | 60.018.400 | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | 40 | | 64.961.800 | 2,00 | 1,00 | |
| | | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | | | **179.125.000** | | | **179.125.000** | | | **141.500.000** | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | | | 179.125.000 | | 1,00 | |
| | | | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 1000 | orang | 179.125.000 | 1000 | orang | 179.125.000 | 1000 | orang | 141.500.000 | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | 1000 | | 179.125.000 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 111.404.350 | | | 81.408.000 | | | 48.536.000 | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | | | 81.408.000 | | 0,73 | |
| | | | Pemberdayaan Pekerja migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah PMI Purna yang diperdayakan | 40 | orang | 111.404.350 | | | 81.408.000 | 20 | orang | 48.536.000 | | - | | | | | | | - | - | | 0,00 | 0 | | 81.408.000 | 0,00 | 0,73 | |
| | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama (PB)** | 90,15 | % | **1.863.830.200** | 0 | | **2.706.631.400** | 90,15 | % | **2.438.902.000** | | **26.850.000** | | | | | | | - | 26.850.000 | | 0,01 | 0 | | 2.733.471.400 | 0,00 | 1,47 | DINAS TENAGA KERJA |
| | | | | **cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan** | 30,26 | % | | | | | 30,26 | % | | | | | | | | | | - | - | | #DIV/0! | 0 | | - | 0,00 | #DIV/0! | DINAS TENAGA KERJA |
| | | | | **Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)** | 55,05 | % | | | | | 55,05 | % | | | | | | | | | | - | - | | #DIV/0! | | | - | 0,00 | #DIV/0! | DINAS TENAGA KERJA |
| | | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **19.130.000** | | | **19.130.000** | | | **19.100.000** | | **800.000** | | | | | | | - | 600.000 | | 0,03 | | | 19.730.000 | | 1,03 | |
| | | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 | laporan | 19.130.000 | 1 | laporan | 19.130.000 | 1 | laporan | 19.100.000 | | 800.000,00 | | | | | | | - | 600.000 | | 0,03 | 1 | | 19.730.000 | 1,00 | 1,03 | |
| | | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Perselisihan yang Tertangani di PB** | | | **1.844.700.200** | | | **2.687.501.400** | | | **2.419.802.000** | | **26.050.000** | | | | | | | - | 26.250.000 | | 0,01 | | | 2.713.741.400 | | 1,47 | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026) | | | Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14=13/8 | | 15=7+13 | | | 16=15/8 | | 17 |
| | | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 6 | perkara | 259.096.600 | 5 | perkara | 205.571.600 | 6 | perkara | 387.475.000 | | 26.250.000,00 | | | | | | | - | | 26.250.000 | - | 0.07 | 5 | | 231.821.600 | 1,00 | 0,89 | |
| | | | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 4 | perkara | 30.202.000 | 4 | perkara | 30.723.000 | 4 | perkara | 15.250.000 | | | | | | | | | - | | - | - | 0,00 | 4 | | 30.723.000 | 1,00 | 1,02 | |
| | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 1 | lembaga | 61.700.000 | 1 | lembaga | 80.209.000 | 1 | lembaga | 61.700.000 | | | | | | | | | - | | - | - | 0,00 | 1 | | 80.209.000 | 1,00 | 1,30 | |
| | | | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 15900 | orang | 1.493.701.600 | 15700 | orang | 2.370.987.800 | 15900 | orang | 1.955.377.000 | | | | | | | | | - | | - | - | 0,00 | 15700 | | 2.370.987.800 | 0,99 | 1,59 | |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan | 10 | % | **82.500.000** | 9,09 | % | **18.000.000** | 10 | % | **20.000.000** | | 0 | | | | | | | - | | - | - | 0,00 | 9,09 | | 18.000.000 | 0,91 | 0,22 | DINAS TENAGA KERJA |
| | | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah** | | | | **82.500.000** | | | **18.000.000** | | | **20.000.000** | | 0 | | | | | | | - | | - | - | 0,00 | | | 18.000.000 | | 0,22 | |
| | | | Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota | 2 | laporan | **27.500.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan | 2 | KK | 28.000.000 | 2 | KK | 18.000.000 | 1 | KK | 18.000.000 | | | | | | | | | - | | - | - | 0,00 | 2 | | 18.000.000 | 1,00 | 0,64 | |
| | | | Penyuluhan Transmigrasi Lokal | Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan | 26 | KK | 23.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0,00 | | | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Perjalanan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran | Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan | 1 | lokasi | 2.000.000 | 0 | 0 | - | 1 | lokasi | 2.000.000 | | | | | | | | | - | | - | - | 0,00 | 0 | | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi | Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi | 1 | lokasi | 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0,00 | | | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 10.352.428.350 | | | 10.058.780.138 | | | 9.177.715.873 | | 818.055.658 | | - | | - | | | 818.055.658 | #DIV/0! | 0,09 | | | | | | |

Rata-rata capaian kinerja #DIV/0! 0,09

Predikat Sangat Kurang

Nganjuk, 8 April 2026
a.n. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris

[redacted], S.AP
Pembina
NIP. [redacted]